

IPTEKS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BITUNG

Yudi Fajriansyah¹, Stanly W. Alexander²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

Email : yfajriansyah@yahoo.co.id

ABSTRACT

Every country, the organization of public services is an obligation for the government to meet the needs and rights of every citizen in the form of goods, services and administration. To realize a good public service then takes the name of the internal control system, wherein the internal control function to control every activity that occurs in the organization in order to create public services effectively and efficiently. As a public sector organization, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung has given good public services to the people especially those in need of service in the field of shipping and ports because based on the evaluation of the implementation of the internal control system it is quite effective even though there are some obstacles in the provision of public services but this can be overcome if they further increase their internal control

Keywords: public services, internal control system, public sector organization, KSOP, evaluation

1. PENDAHULUAN

Suatu sistem dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan suatu perusahaan dapat mencapai sasarnya secara efektif, mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengungkapkan atau menyampaikan pengelolaan keuangan secara andal agar terbebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material, dan melindungi aktiva. Sistem inilah yang disebut dengan istilah sistem pengendalian internal. Namun sampai saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa SPI belum berjalan dengan baik, contohnya di lingkungan pemerintah dapat dilihat dari kejadian yang sering diberitakan seperti laporan keuangan yang opininya adalah WDP, aset pemerintah yang dikelola belum cukup maksimal, masih terjadinya keluhan atau komplain atas pelayanan pemerintah, dan masih banyaknya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang melanggar peraturan, penggunaan sumber daya yang masih kurang efisien dan efektif (Hidayah dan Rustan, 2015).

Peraturan Menteri Perhubungan.No.64.Thn.2010 dijelaskan bahwa KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) mempunyai tugas dan fungsi untuk mengatur, memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan, dan melakukan pengendalian serta pengawasan kegiatan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan digolongkan menjadi enam kelas, Menurut Peraturan Menteri Perhubungan.No.76.Thn.2013 menyatakan untuk di daerah Sulawesi KSOP berjumlah sebanyak 8 unit dan khusus wilayah Sulawesi utara memiliki dua kantor, yaitu KSOP Kelas III Manado dan KSOP Kelas I Bitung. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung merupakan UPT yang bernaung dibawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Matovani, 2015), tugasnya adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti pembuatan buku pelaut, mengurus sertifikat kapal atau surat-surat, dan sebagainya. Sistem pengendalian internal perlu

diterapkan pada pelayanan publik, ini disebabkan karena pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah terkadang dalam prosesnya cukup panjang dan berbelit belit sehingga masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan cara memberikan uang pelicin kepada oknum tertentu di dalam instansi pemerintah yang tujuannya adalah untuk memperlancar urusan mereka. Dengan adanya SPI pada pelayanan publik, salah satunya dapat memantau atau mengawasi setiap prosedur di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya fraud (kecurangan) seperti pungutan liar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem. Romney dan Paul (2006:2) sistem merupakan sekumpulan beberapa komponen atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain dan berinteraksi untuk mencapai tujuannya.

Pengertian Sistem Akuntansi. Menurut Mahmudi (2016:20) sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat kumpulan subsistem subsistem dimana setiap subsistemnya berisikan tahapan, perangkat, proses dan peraturan yang wajib dipatuhi dengan maksud untuk mengumpulkan dan mencatat data keuangan yang selanjutnya data tersebut diolah menjadi laporan keuangan yang ditujukan kepada para pihak yang memiliki kepentingan (internal dan eksternal).

Pengertian Sistem Pengendalian Internal. Krismanji (2015:216) sistem pengendalian internal merupakan rencana dan metode sebuah organisasi yang dilakukan oleh manajemen beserta jajaran yang tujuannya antara lain melindungi aktiva, memberikan informasi yang akurat dan dapat di percaya, tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang undangan. Sistem akuntansi dan SPI keduanya mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Apabila sistem pengendalian internal memadai maka sistem akuntansi nya pun baik.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah.No.60.Thn.2008 menyatakan SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang diterapkan pada lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Unsur Unsur Sistem Pengendalian Internal. Menurut Mulyadi (2001:164), ada empat unsur sistem pengendalian internal yaitu :

1. Bentuk jaringan
2. Otorisasi dan alur pencatatan
3. Aplikasi yang kondusif
4. Pegawai yang berkualitas

Pelayanan Publik. Undang Undang.No.25.Thn.2009 menyatakan pelayanan publik adalah bentuk atau rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana pelayanan yang diberikan bisa berbentuk barang atau jasa.

Jenis – jenis Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.No.63.Thn.2003 menyatakan jenis pelayanan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Barang.* Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai bentuk atau jenis barang.
2. *Jasa.* Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai bentuk jasa.
3. *Administratif.* Pelayanan yang menghasilkan berbagai macam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang diterapkan adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal pada pelayanan publik di KSOP Kelas I Bitung yang menggunakan

unsur unsur pengendalian internal menurut mulyadi, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan kegiatan yang terdapat di dalam organisasi telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang diterapkan adalah dengan cara turut langsung melakukan pengamatan dan ikut serta dalam kegiatan pokok seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman tersebut maka dilakukan penerapan unsur unsur pengendalian internal menurut mulyadi yang terdiri dari empat unsur pokok yaitu bentuk jaringan, otorisasi dan alur pencatatan, aplikasi yang kondusif dan pegawai yang berkualitas.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung adalah sebuah lembaga pemerintah vertical yang berada di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal perhubungan laut, yang berlokasi di Jl.Ir Soekarno No.4 Kota Bitung. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan atau KSOP resmi berganti nama yang sebelumnya adalah Kantor Administrator Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung dipimpin oleh kepala kantor yang bernama Capt. Weku Frederik Karuntu,MM yang mempunyai bawahan sebanyak 94 pegawai yang terbagi ke dalam bagian atau bidang masing masing. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung memiliki tugas diantaranya melakukan pengawasan, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan khususnya di pelabuhan dan cara pengaturannya. Jenis pelayanan yang diberikan KSOP kepada pengguna jasa antara lain pelayanan barang, kapal, jasa, penumpang dan lainnya.

4.2. Pembahasan

1. *Bentuk jaringan.* Dengan adanya bentuk jaringan, dapat memudahkan setiap orang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan di dalam sebuah instansi karena mereka telah mengetahui apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya. Bentuk jaringan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung sudah dipisahkan tugas dan fungsinya, hal ini dapat dilihat dari bagian atau bidang yang telah terbentuk yang mempunyai kerja berbeda beda. Bagian atau bidang tersebut terdiri dari :

- Bagian umum yang terbagi (dua sub bagian)
- Bidang LALA (tiga seksi)
- Bidang SHSK (dua seksi)
- Bidang KBPP (dua seksi)

Dan untuk masalah mengenai laporan keuangan di KSOP Kelas I Bitung memiliki bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Dalam hal urusan penerimaan, bendahara penerimaan bertanggung jawab untuk menerima, menyetorkan PNPB, membuat kode billing, membuat laporan bulanan dan lain lain. Dan tugas bendahara pengeluaran berbeda dengan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran ditugaskan untuk membayarkan, menyimpan uang dsb yang menyangkut keperluan belanja.

2. *Otorisasi dan alur pencatatan.* Segala penerimaan berasal dari PNPB atas pembayaran yang dilakukan pengguna jasa pada jenis pelayanan yang diberikan, untuk prosedurnya yaitu pengguna jasa mengambil nota tagihan sesuai dengan jenis jasa yang dibutuhkan yang terdiri dari satu halaman lima rangkap dan diambil dari petugas tiap seksi yang sudah ditandatangani dan diotorisasi oleh kepala seksi, kemudian mengambil kode billing pada bendahara penerimaan yang diotorisasi oleh kasubag keuangan fungsi dari kode billing digunakan pada saat pembayaran melalui payment channel, setelah melakukan pembayaran tagihan maka nota tagihan beserta bukti pembayaran diserahkan kepada bendahara penerimaan untuk ditukar dengan kwitansi yang terdiri dari satu halaman lima

rangkap tetapi hanya satu rangkap yang diberikan kepada pengguna jasa dan sudah ditandatangani oleh bendahara penerimaan, pengguna jasa yang telah mempunyai kwitansi harus memperlihatkan kepada petugas dari tiap seksi agar dapat diproses jenis jasa yang dibutuhkan. Pencatatan penerimaan dan perhitungan saldo kas yang terdapat di dalam buku kas umum dikerjakan oleh bendahara penerimaan sekali sebulan yang didasarkan atas bukti bukti seperti kwitansi yang berguna sebagai informasi valid bagi pelaporan keuangan. Sedangkan untuk semua jenis pengeluaran yang meliputi belanja pegawai, keperluan kantor dan lain lain yang telah terjadi harus mempunyai bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran tersebut akan diberikan kepada bendahara pengeluaran yang diotorisasi oleh kasubag keuangan untuk mengeluarkan uang sesuai dengan bukti pengeluaran kas (Aisyah, 2017).

3. *Aplikasi yang kondusif.* Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, para pegawai pelayanan public KSOP Kelas I Bitung dituntut untuk tidak membedakan status, derajat dan kelas dari masyarakat yang dilayani. Tetapi beberapa bulan yang lalu, telah terjadi OTT dikarenakan adanya aksi kecurangan seperti pemungutan liar yang dilakukan oleh salah satu staff KSOP Kelas I Bitung. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pada saat itu pengendalian internalnya belum sesuai karena pengawasan terhadap pegawai masih kurang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pegawai tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Saat ini pemantauan terhadap para pegawai sudah ditingkatkan sehingga apabila muncul pungutan pungutan liar lainnya dapat langsung dideteksi dan secepatnya dilakukan tindakan pencegahan.
4. *Pegawai yang berkualitas.* Para staff di KSOP Kelas I Bitung memiliki tingkat pendidikan yang sangat baik, sebagian besar pegawainya mempunyai gelar diploma, sarjana, magister bahkan ada yang menempuh pendidikan sampai S3 dan ada juga beberapa pimpinan memiliki pangkat kapten. Selain itu dilakukan pengembangan sumber daya melalui pelatihan berdasarkan bagian atau bidangnya sehingga para pegawai mengetahui tugas dan kerja sesuai dengan posisi mereka (Turangan et al, 2017). Pelayanan publiknya pun dapat terlaksanakan dengan baik karena didukung dengan sumber daya manusia berkompeten di bidangnya dimana proses dalam memberikan pelayanan dapat dilakukan secara teratur, cepat, dan mudah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sistem pengendalian internal terhadap pelayanan publik yang diterapkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari unsur unsur pengendalian internal yang telah sesuai.

5.2. Saran

Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana tentang pelaksanaan pelayanan seperti memberitahukan kepada masyarakat mengenai prosedur dalam pengurusan surat dan lainnya melalui publikasi standar pelayanan. Sebaiknya para pegawai mengikuti standar pelayanan agar tidak melanggar aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2017. *Sistem Pengendalian Internal Atas Fungsi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sarana Hachery Abadi*. Jurnal Economix STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, Vol. 5, No. 1, 173.
- Hidayah, Kemal dan Rustan A. 2015. *Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Borneo Administrator PKP2A III LAN, Vol. 11, No. 1, 73-74.

- Krismanji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Matovani, Andi E. 2015. *Kualitas Pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang Terhadap Agen Pelayaran Swasta*.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2013 tentang Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan*. Jakarta.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Volume I. Edisi Kesembilan. Diterjemahkan oleh: Deny A. Kwary dan Dewi Fitriasari. Jakarta: Salemba Empat.
- Turangan, Julia C., David P.E Saerang dan Rudy J. Pusung. 2017. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Internal Control) Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Hasil Riset Akuntansi Going Concern Unsrat, Vol. 12, No. 2, 967.